

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Selama tahun 2017, upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas menunjukkan hasil positif. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,27% serta tingkat inflasi terjaga pada tingkat 3,71%. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjaga positif maka mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah, dimana tingkat kemiskinan Jawa Tengah per September 2017 turun sebanyak 0,96% menjadi 12,23%.

Tahun 2017 merupakan tahun keempat dalam pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng 2013 – 2018. Fokus pembangunan sektor Koperasi dan UMKM (KUMKM) tahun 2017 adalah peningkatan kelas KUMKM melalui pengembangan produk unggulan daerah dengan pendekatan One Village One Product (OVOP). Hasil pemberdayaan KUMKM di Jawa Tengah selama tahun 2017 menunjukkan kondisi yang cukup menggembirakan. Saat ini, di Jawa Tengah terdapat 25.906 koperasi dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 21.455 unit (82,81%) dan koperasi tidak aktif sebanyak 4.451 unit (17,19%). Adapun jumlah anggota koperasi selama Tahun 2017 bertambah sebanyak 163.080 orang, menjadi 8.221.627 orang. Pertumbuhan jumlah koperasi tersebut diikuti dengan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada sektor koperasi, mampu menyerap 14.857 orang tenaga kerja baru, sehingga total tenaga kerja yang bergerak pada sektor koperasi sebanyak 168.352 orang. Sedangkan dari sisi usaha, aset koperasi di Jawa Tengah sebesar Rp. 65,664 Triliun atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 8,026 Triliun (13,92%). Dari aset tersebut, mampu menghasilkan omset sebesar Rp. 61,056 Triliun atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 7,543 Triliun (13,94%).

Sejalan dengan telah diimplementasikannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang memberikan kewenangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat. Setelah penyusunan

perencanaan dan pelaksanaan program – program pembangunan, perlu dilakukan evaluasi program/kegiatan guna mengetahui sejauh mana efektivitas atas program/kegiatan yang sudah dilakukan terhadap pencapaian sasaran sesuai dengan visi misi suatu instansi. Salah satu bentuk pertanggungjawaban yang wajib dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dokumen LKjIP sendiri disusun sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas, pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi serta sebagai alat penilaian dan pengendalian dalam rangka memacu peningkatan kinerja organisasi.

B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Korupsi.
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran SKPD sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang;
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 tahun 2016 Bab II tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi disebutkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan bidang kelembagaan, pengawasan, bina usaha dan pemasaran, restrukturisasi dan pembiayaan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan, pengawasan, bina usahadan pemasaran, restrukturisasi dan pembiayaan;
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kelembagaan, pengawasan, bina usaha dan pemasaran, restrukturisasi dan pembiayaan;
4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas menurut pasal 5 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 tahun 2016, susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas membawahkan :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Kelembagaan;
 - c. Bidang Pengawasan;
 - d. Bidang Bina Usaha dan Pemasaran;
 - e. Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan;
 - f. UPT Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
3. Bidang-bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
4. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi.
5. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

E. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN SARPRAS

1. Susunan kepegawaian :

Jumlah pegawai/personil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 sebanyak 126 orang terdiri dari :

Pegawai Negeri Sipil : 125 orang

Pekerja Harian Lepas : 1 orang

Tabel 1.
Kekuatan Personil PNS Menurut Golongan

BIDANG	GOL I		GOL II		GOL III		GOL IV		JUMLAH
	P	W	P	W	P	W	P	W	
Sekretariat	1	0	6	0	12	14	4	1	38
Kelembagaan Koperasi & UMKM	1	0	1	1	5	4	2	1	15
Pemberdayaan UMKM	0	0	3	0	5	3	0	5	16
Pemberdayaan Koperasi	0	0	2	0	7	3	3	1	16
Pemberdayaan KSP	0	0	1	0	8	5	2	1	17
Balatkop	4	0	2	0	5	8	1	1	21
Diperbantukan KPU Jateng	0	0	0	0	0	0	1	1	2
JUMLAH	6	0	15	1	42	37	13	11	125

Tabel 2.
Kekuatan Personil PNS Menurut Pendidikan

BIDANG	SD		SMP		SMA		DIII		S1		S2		JUMLAH
	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	
Sekretariat	0	0	4	0	3	0	2	0	6	12	8	3	38
Kelembagaan Koperasi dan UMKM	0	0	0	1	3	0	0	0	2	3	4	2	15
Pemberdayaan UMKM	1	0	1	0	0	0	0	0	4	3	2	5	16
Pemberdayaan Koperasi	0	0	0	0	2	0	3	0	0	3	7	1	16
Pemberdayaan KSP	0	0	0	0	2	0	0	0	6	4	3	2	17
Balatkop	1	1	0	0	6	1	0	0	4	5	1	2	21
Diperbantukan KPU Jateng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
JUMLAH	2	1	5	1	16	1	5	0	22	30	26	16	125

Tabel 3.
Struktur Esselon PNS Menurut Jenis Kelamin

PENDIDIKAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
Esselon II	-	1 orang	1 orang
Esselon III	3 orang	3 orang	6 orang
Esselon IV	7 orang	7 orang	14 orang
JUMLAH	10 orang	11 orang	21 orang

*Catatan : 2 PNS diperbantukan ke KPU Prov. Jateng dengan 2 orang menduduki jabatan Esselon III, dimana untuk Gaji dan TPP tetap dianggarkan pada Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah memperoleh alokasi 1 (satu) orang widyaiswara yang ditempatkan pada UPTD Balatkop untuk mendukung pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat KUMKM.

2. Sarana dan Prasarana :

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.
Tanah dan Gedung Yang Dimiliki

NO	URAIAN	LUAS
1	Tanah 6 (enam) bidang terdiri dari	
	a. Tanah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah	3.243 M ²
	b. Tanah UPTD Balatkop 1	5.500 M ²
	c. Tanah UMKM Center	2.617 M ²
	d. Tanah UPTD Balatkop 2	2.320 M ²
	e. Tanah PLUT KUMKM di Ds Dukuh Waluh Kec. Kembaran Kab. Banyumas	927 M ²
	f. Tanah di Ds. Dawuhan Kab. Banyumas	480 M ²
2	Bangunan Gedung 5 unit terdiri dari	
	a. Bangunan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah	1.486 M ²
	b. Bangunan Balatkop	3.367 M ²
	c. Bangunan UMKM Center	2.990 M ²
	d. Bangunan PLUT KUMKM di Ds. Dukuh Waluh Kec. Kembaran Kab. Banyumas	654 M ²
	e. Bangunan di Ds. Dawuhan Kab. Banyumas	120 M ²

Tabel 5.
Kendaraan Bermotor Yang Dimiliki

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) sejumlah 13 (tiga belas) unit terdiri dari :	
	a. Honda Civic VTI Tahun 2001 (H 54)	1 unit
	b. Toyota Innova Tahun 2014 (H 275)	1 unit
	c. Toyota Kijang LGX Tahun 2004 (H 9504 VR)	1 unit
	d. Toyota Innova G Diesel Tahun 2005 (H 9501 GR)	1 unit
	e. Toyota Avansa 1300 G Tahun 2010 (H 9501 HG)	1 unit
	f. Toyota Avansa 1300 G Tahun 2010 (H 9501 FR)	1 unit
	g. Toyota Innova Tahun 2011 (H 9506 CG)	1 unit
	h. Toyota Innova Tahun 2011 (H 9506 KG)	1 unit
	i. Toyota Innova Tahun 2011 (H 9506 PR)	1 unit
	j. Toyota Innova Tahun 2011 (H 9506 GZ)	1 unit
	k. Toyota Avanza Veloz Tahun 2013 (H 9529 ZR)	1 unit
	l. Suzuki APV 1500 GL Tahun 2014 (H 9525 FZ)	1 unit
m. Pick Up Tahun 2015 (H 9579 VG)	1 unit	
2	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) sejumlah 8 (delapan) unit terdiri dari	
	a. Di Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah	8 unit

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Tahun 2017 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah memfokuskan pencapaian sasaran utama pada:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan Koperasi dan UMKM;
2. Pengembangan Produk Unggulan Daerah berbasis Sumber Daya Lokal;
3. Peningkatan akses permodalan dan efektivitas pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM;
4. Peningkatan produktivitas jaringan pemasaran dan usaha Koperasi dan UMKM;
5. Peningkatkan kualitas SDM Koperasi dan UMKM.

Sasaran-sasaran dimaksud perlu diprioritaskan dalam rangka untuk mendukung tercapainya tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah yaitu **"SEJAHTERA BERSAMA KOPERASI DAN UMKM"**. Guna mencapai sasaran dimaksud maka pada tahun 2017 telah menetapkan 5 program utama dan 51 kegiatan.

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana stratejik adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana stretegis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 - 2018 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2013 – 2018.

Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Tujuan dan Sasaran yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah yaitu :

1. Tujuan

Tujuan merupakan suatu keadaan yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 yaitu "**Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari – Mboten Korupsi Mboten Ngapusi**". Dengan mengacu pada Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut, maka OPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah memiliki Tujuan sebagai berikut "**SEJAHTERA BERSAMA KOPERASI DAN UMKM**". Makna yang terkandung dari tujuan diatas adalah :

SEJAHTERA

Sejahtera merupakan suatu kondisi dimana segala macam kebutuhan masyarakat terpenuhi, baik berupa kebutuhan jasmani maupun rohani. Dalam konteks pembangunan Koperasi dan UMKM, sejahtera berarti tercukupinya kebutuhan masyarakat Koperasi dan UMKM baik lahir maupun batin, dimana hal sesuai dengan amanat UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Mengingat bahwa kondisi sejahtera dinamis sesuai dengan tuntutan dan aspirasi yang berkembang, maka diperlukan upaya terus – menerus dalam penyempurnaan paket kebijakan, strategi program kegiatan serta pembinaan guna mewujudkan kondisi tersebut.

BERSAMA

Bersama merupakan suatu ikatan yang terbentuk atas dasar kesamaan tujuan maupun rasa kekeluargaan, dimana salah satu ciri utamanya adalah rasa saling memiliki dan kepedulian antar anggota terhadap kondisi dan arah hubungan yang terjalin. Dalam konteks pembangunan Koperasi dan UMKM, bersama berarti suatu hubungan yang harmonis antara Pemerintah, Gerakan Koperasi dan UMKM, serta masyarakat dan para pemangku kebijakan lainnya dalam mensinergikan upaya pembangunan Koperasi dan UMKM guna memperoleh hasil yang optimal.

Dengan demikian tujuan "SEJAHTERA BERSAMA KOPERASI DAN UMKM" dapat didefinisikan sebagai upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat Koperasi dan UMKM melalui sinergisitas antara pemerintah, masyarakat serta segenap pemangku kepentingan lainnya.

2. Sasaran

Tujuan tersebut dilaksanakan melalui Sasaran sebagai berikut:

- a. Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah sbb:
 - 1) Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan
 - 2) Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran
 - 3) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”
 - 4) Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan
 - 5) Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak
 - 6) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat
 - 7) Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan
- b. Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah adalah:
 - 1) Meningkatkan peran koperasi dalam perekonomian Jawa Tengah
 - 2) Bertambahnya jumlah produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa Tengah
 - 3) Meningkatkan daya saing KUKM di Jawa Tengah
 - 4) Meningkatnya jumlah wirausaha baru di Jawa Tengah
 - 5) Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UKM
 - 6) Meningkatnya kualitas serta integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pemberdayaan KUMKM antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - 7) Meningkatnya kualitas SDM Aparatur

3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan Kebijakan pada hakekatnya merupakan penjabaran dari sasaran untuk mewujudkan tujuan pembangunan Koperasi dan UMKM selama kurun waktu 2013-2018. Strategi dan Kebijakan pada masing-masing sasaran diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran koperasi dalam perekonomian Jawa Tengah

Strategi :

- a. Mendorong penguatan kapasitas kelembagaan dan tata laksana koperasi;
- b. Meningkatkan ketertiban administrasi Koperasi sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
- c. Meningkatkan pemahaman dan semangat masyarakat untuk berkoperasi.

Kebijakan :

- a. Peningkatan pemahaman dan kapasitas Pengurus/Pengawas terkait kelembagaan dan tata laksana Koperasi;
- b. Pembinaan dan pengawasan koperasi;
- c. Fasilitasi pelayanan pendirian Koperasi, perubahan Badan Hukum/ Anggaran Dasar Koperasi dan Pembubaran Koperasi;
- d. Edukasi masyarakat atas perkoperasian.

2. Meningkatkan Jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa Tengah

Strategi :

- a. Pengembangan Program OVOP di Jawa Tengah.

Kebijakan :

- a. Meningkatkan koordinasi dengan Kab/Kota dalam hal pengembangan OVOP di Jawa Tengah;
- b. Peningkatan kesadaran masyarakat atas produk OVOP.

3. Meningkatkan daya saing Koperasi dan UKM di Jawa Tengah

Strategi :

- a. Peningkatan produktivitas dan penguasaan teknologi tepat guna bagi Koperasi dan UKM;
- b. Restrukturisasi Manajemen dan Usaha bagi Koperasi dan UKM;

- c. Peningkatan akses pembiayaan bagi Koperasi dan UKM;
- d. Peningkatan akses pemasaran bagi produk Koperasi dan UKM.
- e. Peningkatan pemanfaatan sistem dan teknologi informasi bagi KUKM

Kebijakan :

- a. Meningkatkan pemahaman Koperasi dan UKM tentang *good manufacturing process*;
- b. Meningkatkan kualitas manajemen dan pengelolaan usaha bagi Koperasi dan UKM;
- c. Meningkatkan pemahaman Koperasi dan UKM tentang akses pembiayaan;
- d. Meningkatkan jejaring, sistem distribusi dan pemasaran bagi produk Koperasi dan UKM.
- e. Penyusunan sistem informasi Koperasi dan UKM di Jawa Tengah
- f. Peningkatan penguasaan teknologi informasi bagi KUKM di Jawa Tengah

4. Meningkatkan jumlah wirausaha di Jawa Tengah

Strategi :

- a. Pengembangan Inkubator Bisnis;
- b. Pengembangan Klinik Bisnis pada Pusat Layanan Usaha Terpadu.

Kebijakan :

- a. Menyelenggarakan bimbingan dan pendampingan bagi Calon Wirausaha Baru (Angkatan Kerja Baru);
- b. Menyelenggarakan Temu Bisnis dan Pemagangan Kerja.

5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola Koperasi dan UKM

Strategi :

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Pengurus/Pengelola KUKM.
- b. Peningkatan kualitas Instruktur dan Tenaga Pendamping bagi KUKM

Kebijakan :

- a. Peningkatan keahlian dan ketrampilan Pengurus/Pengelola Koperasi dan UKM melalui pelatihan berbasis manajerial, vokasional, serta kompetensi.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait untuk mendorong peningkatan kualitas Instruktur maupun tenaga pendamping.
- c. Optimalisasi pemanfaatan tenaga pendamping dengan fokus pada pemberdayaan KUKM.

6. Meningkatkan kualitas perencanaan pemberdayaan KUKM

Strategi :

- a. Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi antara Pusat dan Daerah

Kebijakan :

- a. Meningkatkan koordinasi antara Pusat dan Daerah

7. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur

Strategi :

- a. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur.

Kebijakan :

- a. Pendidikan dan pelatihan bagi SDM Aparatur sesuai kebutuhan.

B. RENCANA KINERJA TAHUN (RKT) 2017

Dalam rencana kinerja Tahun 2017 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah, sasaran, indikator, dan target yang hendak dicapai adalah sebagai mana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 5.
Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2017**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya peran Koperasi dalam perekonomian Jawa Tengah	1) Presentase Koperasi Aktif 2) Presentase Koperasi Provinsi Berkualitas 3) Presentase Koperasi Sehat 4) Presentase omzet Koperasi terhadap PDRB Jawa Tengah	81,90% 61% 18,30% 6,90%
Bertambahnya jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa Tengah	Jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa Tengah	210

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya daya saing KUMKM di Jawa Tengah	1) Presentase Pertumbuhan Aset Koperasi 2) Presentase Pertumbuhan Aset UMKM yang dibina 3) Presentase Pertumbuhan Omset Koperasi 4) Presentase Pertumbuhan Omset UMKM yang dibina 5) Presentase UMKM yang telah mengakses kredit 6) Jangkauan Pemasaran Produk KUMKM	13,55% 13,10% 13,85% 12,50% 25,5% 16 Prov, 3 Luar Negeri
Meningkatkan jumlah wirausaha di Jawa Tengah	Penumbuhan wirausaha baru di Jawa Tengah	325
Meningkatnya penyerapan tenaga kerja oleh KUMKM	Presentase Pertumbuhan Tenaga Kerja KUMKM	12,75%
Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKM	Pengurus KUMKM yang kompeten	17.375

C. PENETAPAN KINERJA (PK) TAHUN 2017

Dari Rencana Kinerja Tahunan diatas, setelah dilakukan pembahasan dan penajaman dengan pihak terkait, maka telah dilakukan Penetapan Kinerja yang telah disepakati antara kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah dengan Kepala Daerah Tahun 2017, yaitu sebagai berikut :

Tabel 6.
Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
1. Meningkatnya peran Koperasi dalam perekonomian Jawa Tengah	1) Presentase Koperasi Aktif	81,90%	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM	6.564.033.000		
	2) Presentase Koperasi Provinsi Berkualitas	61%				
2. Bertambahnya jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa Tengah	3) Presentase Koperasi Sehat	18,30%	Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha	3.025.000.000		
	4) Presentase omzet Koperasi terhadap PDRB Jawa Tengah	6,90%				
3. Meningkatnya daya saing KUMKM di Jawa Tengah	1) Jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa Tengah	210	Program Peningkatan Kualitas SDM KUMKM	5.575.000.000		
	2) Presentase Pertumbuhan Aset Koperasi	13,55%				
4. Meningkatkan jumlah wirausaha di Jawa Tengah	3) Presentase Pertumbuhan Aset UMKM yang dibina	13,10%	Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah berbasis Sumber Daya Lokal	9.531.000.000		
	4) Presentase Pertumbuhan Omset Koperasi	13,85%				
	5) Presentase Pertumbuhan Omset UMKM yang dibina	12,50%				
	6) Presentase UMKM yang telah mengakses kredit	25,5%				
	1) Jangkauan Pemasaran Produk KUMKM	16 Prov, 3 LN			Program Pengembangan Akses Permodalan dan Efektivitas Pembiayaan	1.700.000.000
	2) Penumbuhan wirausaha baru di Jawa Tengah	325				
5. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja oleh KUMKM	1) Presentase Pertumbuhan Tenaga Kerja KUMKM	12,75%				
6. Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKM	1) Pengurus KUMKM yang kompeten	17.375				

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas .

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah. Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2017 ada 3 (tiga) aspek yang akan dibahas, yaitu :

1. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
2. Evaluasi dan Analisis Kinerja
3. Akuntabilitas Keuangan

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

- > 101 = Amat Baik
- 80 - 100 = Baik
- 50 - 79 = Cukup
- < 49 = Kurang

A. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

Hingga akhir tahun 2017, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai selama tahun 2017 adalah :

1. Meningkatnya peran Koperasi dalam perekonomian Jawa Tengah
2. Bertambahnya jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jateng
3. Meningkatnya daya saing KUMKM di Jawa Tengah
4. Meningkatkan jumlah wirausaha di Jawa Tengah
5. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja oleh KUMKM
6. Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKM

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian atas sasaran tersebut sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan sektor Koperasi dan UMKM di Jawa Tengah, telah dilakukan pengukuran terhadap sasaran tersebut sebagai berikut :

a. Sasaran ke-1 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran ke-1, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 7.
Pengukuran Pencapaian Sasaran ke-1**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya peran Koperasi dalam perekonomian Jawa Tengah	1. Presentase Koperasi Aktif	1. 81,90%	1. 82,81%	1. 101,11%
	2. Presentase Koperasi Provinsi Berkualitas	2. 61%	2. 61,69%	2. 101,13%
	3. Presentase Koperasi Sehat	3. 18,30%	3. 19,86%	3. 108,52%
	4. Presentase omzet Koperasi terhadap PDRB Jawa Tengah	4. 6,90%	4. Data belum tersedia	4. Data belum tersedia
Rata-Rata capaian sasaran ke-1				103,59%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **sasaran ke-1**, dari 4 indikator kinerja terdapat 3 indikator yang sudah dapat diukur kinerjanya, dan ada 1 indikator kinerja yang belum dapat diukur, yaitu Presentase Omset Koperasi terhadap PDRB Jawa Tengah. Penyebab indikator tersebut belum dapat diukur adalah belum tersedianya data PDRB Jawa Tengah Tahun 2017 oleh BPS. Adapun untuk ketiga indikator lainnya telah dapat diukur dan hasil rata – rata dari pengukuran ketiga indikator tersebut menunjukkan nilai sebesar 103,59% atau berpredikat **amat baik**.

Adapun penyebab capaian kinerja dari indikator tersebut mampu diatas target disebabkan antara lain :

1. Koordinasi antara Pusat, Provinsi, serta Kabupaten/Kota dalam mendorong efektivitas pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung penguatan kelembagaan koperasi
2. Meningkatnya kesadaran koperasi untuk meningkatkan pelayanan bagi anggota dalam menghadapi persaingan yang semakin dinamis.
3. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat melalui APBN Dekonsentrasi dalam bentuk kegiatan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan dan Satuan Tugas Pengawasan Koperasi.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Daerah dalam pelaksanaan program/kegiatan yang sudah disusun.
2. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program/kegiatan dengan melibatkan pihak terkait guna dijadikan penyempurnaan perencanaan kedepannya.

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Melibatkan Asosiasi Profesi maupun Perguruan Tinggi dalam meningkatkan pendampingan bagi koperasi maupun KSP.
2. Mendorong peningkatan kualitas SDM Aparatur Pembina melalui diklat teknis.
3. Meningkatkan sosialisasi peraturan perundangan terkait pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi baik bagi gerakan koperasi maupun aparatur pembina.

b. Sasaran ke-2 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran ke-2, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel 8.
Pengukuran Pencapaian Sasaran ke-2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bertambahnya jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jateng	Jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa Tengah	210 Produk	210 Produk	100%
Rata-Rata capaian sasaran ke-2				100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **sasaran ke-2**, dapat dilihat bahwa capaian sesuai dengan target (100%) atau berpredikat **baik**.

Upaya yang telah dilakukan guna mendukung pencapaian target tersebut antara lain :

1. Mengarahkan program/kegiatan baik Provinsi maupun Kab/Kota untuk mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah berbasis Sumber Daya Lokal.
2. Melibatkan *stakeholders* pembina UMKM (Asosiasi Profesi/Usaha, Perguruan Tinggi) untuk melakukan pendampingan bagi para pelaku OVOP mulai dari aspek manajerial, pemasaran, produksi, hingga pada pembiayaan.

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kualitas dari produk OVOP di Jawa Tengah, maka upaya pembinaan akan difokuskan pada pengembangan kualitas melalui :
 - a. Penguatan manajemen usaha para pelaku OVOP.
 - b. Peningkatan produktivitas dan daya saing pelaku OVOP.
 - c. Perluasan jaringan pemasaran dan usaha pelaku OVOP.
2. Melakukan kampanye produk OVOP kepada masyarakat sehingga mendorong peningkatan permintaan atas produk – produk OVOP.

c. Sasaran ke-3 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran ke-3, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel 9.
Pengukuran Pencapaian Sasaran ke-3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya daya saing KUMKM di Jawa Tengah	1. Presentase Pertumbuhan Aset Koperasi	1. 13,55%	1. 13,92%	1. 102,73%
	2. Presentase Pertumbuhan Aset UMKM yang dibina	2. 13,10%	2. 14,67%	2. 111,98%
	3. Presentase Pertumbuhan Omset Koperasi	3. 13,85%	3. 13,94%	3. 100,64%
	4. Presentase Pertumbuhan Omset UMKM yang dibina	4. 12,50%	4. 13,03%	4. 104,24%
	5. Presentase UMKM yang telah mengakses kredit	5. 25,5%	5. 30,43%	5. 119,33%
	6. Jangkauan Pemasaran Produk KUMKM	6. 16 Prov, 3 Luar Negeri	6. 20 Prov, 6 Luar Negeri	6. 136,84%
Rata-Rata capaian sasaran ke-3				112,63%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **sasaran ke-3**, dari 6 indikator kinerja sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari 6 indikator kinerja dicapai melebihi target yang telah ditetapkan (rata-rata capaian sasaran ke-3 adalah sebesar 112,63%) atau berpredikat **amat baik**.

Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa terdapat indikator yang pencapaiannya jauh diatas target, yaitu Jangkauan Pemasaran Produk KUMKM (136,84%). Hal ini disebabkan oleh kebijakan Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng yang sangat selektif untuk mengikuti pameran – pameran berskala internasional maupun regional sehingga mengakibatkan transaksi yang terjadi antara KUMKM Jawa Tengah dengan pembeli dari berbagai macam negara.

Dalam rangka mendorong peningkatan capaian kinerja di masa yang akan datang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Memperluas program kemitraan antara KUMKM dengan Perusahaan Besar untuk meningkatkan daya saing KUMKM Jawa Tengah.
2. Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain untuk memperluas potensi pasar produk KUMKM Jawa Tengah.
3. Mendorong partisipasi Pemerintah Kab/Kota untuk menjadi mitra PT. Jamkrida Jateng dalam rangka perluasan penjaminan kredit bagi KUMKM Jawa Tengah.

d. Sasaran ke-4 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran ke-4 :

Tabel 10.
Pengukuran Pencapaian Sasaran ke-4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan jumlah wirausaha di Jawa Tengah	Penumbuhan wirausaha baru di Jawa Tengah	325 orang	325 orang	100%
Rata-Rata capaian sasaran ke-4				100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **sasaran ke-4**, dari indikator kinerja diatas dapat dilihat bahwa kinerjanya sesuai target (100%) atau berpredikat **baik**. Untuk menjaga tingkat capaian tersebut, maka upaya yang dilakukan Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng ke depan adalah dengan melibatkan Perguruan Tinggi ataupun Konsultan/Tenaga Pendamping untuk melaksanakan pendampingan secara ruti bagi wirausaha – wirausaha baru. Selain itu, pembinaan dari sisi legalitas usaha serta peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan oleh Dinas Provinsi maupun Dinas Kabupaten/Kota.

e. Sasaran ke-5 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran ke-5 :

Tabel 11.
Pengukuran Pencapaian Sasaran ke-5

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya penyerapan tenaga kerja oleh KUMKM	Presentase Pertumbuhan Tenaga Kerja KUMKM	12,25%	12,84%	100,71%
Rata-Rata capaian sasaran ke-5				100,71%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **sasaran ke-5**, dari indikator kinerja diatas dapat dilihat bahwa kinerjanya sesuai target (100%) atau berpredikat **amat baik**. Kondisi ini disebabkan antara lain :

1. Serangkaian paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, memberikan ruang tumbuh bagi KUMKM untuk melakukan ekspansi usaha. Hal ini tentunya meningkatkan penyerapan tenaga kerja oleh KUMKM.
2. Minat masyarakat untuk bekerja pada Koperasi maupun UMKM meningkat seiring dengan kemampuan KUMKM dalam memberikan benefit yang menarik bagi karyawannya.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja kedepan, upaya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Menjaga tingkat penyerapan tenaga kerja oleh KUMKM melalui penciptaan kondusivitas dan iklim usaha yang nyaman.
2. Mendorong profesionalitas pengelolaan KUMKM melalui pendampingan usaha maupun pemberian layanan konsultasi usaha oleh tenaga konsultan.

f. Sasaran ke-6 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran ke-6 :

Tabel 12.
Pengukuran Pencapaian Sasaran ke-6

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presen tase(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKM	Pengelola KUMKM yang kompeten	17.375 orang	17.375 orang	100%
Rata-Rata capaian sasaran ke-6				100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **sasaran ke-6**, dari indikator kinerja diatas dapat dilihat bahwa kinerjanya sesuai target (100%) atau berpredikat **baik**. Adapun penyebab tercapainya capaian kinerja dibanding target tersebut disebabkan kesadaran dari Koperasi dan UMKM atas pentingnya kualitas sumber daya manusia sebagai kunci keunggulan bersaing.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja kedepan, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penyusunan silabus dan materi ajar yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
2. Meningkatkan kompetensi dan keahlian tenaga pengajar pada UPT Balai Latihan Koperasi dan UKM sesuai dengan kebutuhan KUKM.

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pada hasil perhitungan pengukuran pencapaian sasaran (PPS) yang telah di lakukan di atas dengan membandingkan antara rencana pencapaian target dengan realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun Anggaran 2017 dikategorikan **Amat Baik** (106,71%). Sedangkan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, walaupun terdapat beberapa indikator yang mengalami penurunan capaian tetapi secara mayoritas mengalami kenaikan capaian. Berikut disajikan perbandingan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 dengan Tahun 2016.

Tabel 13.
Perbandingan Kinerja Tahun 2017 dan Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun 2016	Selisih (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Presentase Koperasi Aktif	101,11%	100,41%	0,70%
2	Presentase Koperasi Provinsi Berkualitas	101,13%	100,25%	0,88%
3	Presentase Koperasi Sehat	108,52%	109,62%	(1,10%)
4	Presentase Omset Koperasi terhadap PDRB Jawa Tengah	n/a*	4,98%	n/a
5	Jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa Tengah	100%	100%	0%
6	Presentase Pertumbuhan Aset Koperasi	102,73%	130,79%	(28,06%)
7	Presentase Pertumbuhan Aset UMKM yang dibina	111,98%	164,73%	(52,75%)
8	Presentase Pertumbuhan Omset Koperasi	100,64%	105,09%	(4,45%)
9	Presentase Pertumbuhan Omset UMKM yang dibina	104,24%	424,44%	(320,20%)
10	Presentase UMKM yang telah mengakses kredit	119,33%	114,84%	4,49%
11	Jangkauan Pemasaran Produk KUMKM	136,84%	126,67%	10,17%
12	Penumbuhan wirausaha baru di Jawa Tengah	100%	186,67%	(86,67%)
13	Presentase Pertumbuhan Tenaga Kerja KUMKM	100,71%	72,48%	28,26%
14	Pengurus KUMKM yang kompeten	100%	100%	0%

* data tahun 2017 belum tersedia

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, pada tahun anggaran 2017, yaitu :

a. Target Pendapatan

Pada tahun 2017, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah ditargetkan untuk menghasilkan pendapatan

sebanyak Rp. 730.000.000,- namun ternyata pendapatan yang diperoleh sebesar Rp 732.015.000,- atau dicapai sebesar 100,28%.

Rincian target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 14.
Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2017

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih	Presentase (%)
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Pelayanan Pendidikan	22.600.000	50.000.000	(27.400.000)	221,24%
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	707.400.000	682.015.000	25.385.000	96,41%
Jumlah 2017		730.000.000	732.015.000	(2.015.000)	100,28%
Capaian Tahun 2016		615.000.000	618.690.000	(3.690.000)	100,60%
Selisih (2017 – 2016)		115.000.000	113.325.000	(1.675.000)	

Berdasarkan tabel di atas terlihat terdapat kenaikan target pendapatan Tahun 2017 dibandingkan Tahun 2016 , yaitu dari semula Rp. 615.000.000,- menjadi Rp. 730.000.000,-. Meskipun terdapat kenaikan target pendapatan, berkat kerja keras dan upaya peningkatan sarana prasarana UPT Balatkop, target tersebut dapat terpenuhi bahkan melampaui target. Realisasi pendapatan pada 2017 mencapai Rp. 732.015.000,- atau lebih besar Rp. 2.015.000,- (100,28%) dari target sebesar Rp. 730.000.000,-.

b. Pelaksanaan APBD Tahun 2017

Pada tahun 2017 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan anggaran sebesar Rp. 51.523.676.000,-, dengan serapan pada akhir tahun sebesar Rp. 49.472.657.036,- (96,02%) atau terdapat Sisa Lebih Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.051.018.964,-.

Anggaran sejumlah Rp. 51.523.676.000,- tersebut terdiri atas : (1) Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 18.393.643.000,- ; dan (2) Belanja Langsung sebesar Rp. 33.130.033.000,-

Apabila dilihat dari jenis belanja, maka realisasi belanja tidak langsung adalah sebesar Rp. 18.140.116.997,- (98,62%) dari total anggaran yang tersedia sebesar Rp 18.393.643.000,- . Sementara untuk belanja langsung dari anggaran sebesar Rp. 33.130.033.000,- direalisasikan sebesar Rp. 31.332.540.039,- (94,57%).

Selanjutnya disajikan perincian data anggaran dan realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2017.

Tabel 15.
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2017

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN APBD	REALISASI	SELISIH	%
1	2	3	4	5	6
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	18.393.643.000	18.140.116.997	253.526.003	98,62
II	BELANJA LANGSUNG	33.130.033.000	31.332.540.039	1.797.492.961	94,57
	I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Dinas	12.000.000	10.481.730	1.518.270	87,35
2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balatkop	7.000.000	6.999.060	940	99,99
3	Penyediaan Jasa komunikasi, SDA dan Listrik Sekretariat Dinas	620.000.000	607.390.393	12.609.607	97,97
4	Penyediaan Jasa komunikasi, SDA dan Listrik Balatkop	330.000.000	293.874.977	36.125.023	89,05
5	Jaminan Barang Milik Daerah	70.000.000	69.678.131	321.869	99,54
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Sekretariat Dinas	510.000.000	504.150.820	5.849.180	98,85
7	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balatkop	250.000.000	248.981.800	1.018.200	99,59
8	Penyediaan alat tulis kantor Sekretariat	200.000.000	167.838.000	32.162.000	83,92
9	Penyediaan alat tulis kantor Balatkop	50.000.000	49.479.250	520.750	98,96
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	75.000.000	71.799.925	3.200.075	95,73
11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan Sekretariat	50.000.000	49.940.000	60.000	99,88
12	Penyediaan barang cetak dan penggandaan Balatkop	25.000.000	25.000.000	0	100
13	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Sekretariat	50.000.000	41.006.000	8.994.000	82,01
14	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Balatkop	50.000.000	49.651.000	349.000	99,30
15	Penyediaan peralatan rumah tangga Sekretariat	20.000.000	19.626.000	374.000	98,13
16	Penyediaan peralatan rumah tangga Balatkop	10.000.000	10.000.000	0	100
17	Penyediaan bahan bacaan, peraturan perundang – undangan Sekretariat	24.000.000	23.925.000	75.000	99,69

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN APBD	REALISASI	SELISIH	%
1	2	3	4	5	6
18	Penyediaan bahan bacaan, peraturan perundang – undangan Balatkop	10.000.000	9.970.000	30.000	99,70
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah Sekretariat	1.135.000.000	1.117.995.593	17.004.407	98,50
20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah Balatkop	75.000.000	71.799.925	3.200.075	95,73
21	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Sekretariat Dinas	765.000.000	755.311.843	9.688.157	98,73
22	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Balatkop	113.000.000	112.572.000	428.000	99,62
23	Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi	600.000.000	592.012.000	7.988.000	98,67
	II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
24	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Sekretariat Dinas	450.000.000	445.204.706	4.795.292	98,93
25	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Balatkop	48.000.000	47.999.970	30	99,99
26	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	350.000.000	348.950.329	1.049.671	99,70
27	Pemeliharaan rutin/ berkala meubelair Sekretariat	20.000.000	20.000.000	0	100
28	Pemeliharaan rutin/ berkala meubelair Balatkop	20.000.000	20.000.000	0	100
29	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan Rumah tangga Sekretariat	250.000.000	248.185.700	1.814.300	99,27
30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan Rumah tangga Balatkop	50.000.000	49.950.000	50.000	99,90
31	Peningkatan sarana dan prasarana kantor Sekretariat	380.000.000	369.949.000	10.051.000	97,36
32	Peningkatan sarana dan prasarana kantor Balatkop	66.000.000	65.261.000	739.000	98,88
	III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.				
33	Pendidikan dan Pelatihan Formal.	50.000.000	44.652.000	5.348.000	89,30
	IV Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM.				
34	Peningkatan Pemasarakatan dan Kelembagaan Koperasi	812.500.000	759.578.200	52.921.800	93,49
35	Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	1.812.500.000	1.763.776.300	48.723.700	97,31
36	Pemeringkatan Koperasi dan Penilaian Kesehatan KSP	1.512.500.000	1.479.638.450	32.861.550	97,83
37	Pengembangan Manajemen dan Usaha KSP	1.512.500.000	1.446.519.800	65.980.200	95,64
38	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemberdayaan KUMKM	914.033.000	846.712.900	67.320.100	92,63
	V Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha				
39	Peningkatan Jaringan Produk KUKM bagi Anggota Mitra Praja Utama (MPU)	300.000.000	244.765.614	55.234.386	81,59
40	Fasilitasi Akses Pemasaran bagi Produk KUMKM	2.396.650.000	2.161.374.956	235.275.044	90,18
41	Pengembangan Layanan Usaha bagi KUMKM	325.000.000	319.230.400	5.762.600	98,22
42	Komite Pemasaran Produk Unggulan Produk KUMKM	3.350.000	3.350.000	0	100

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN APBD	REALISASI	SELISIH	%
1	2	3	4	5	6
	VI Program Peningkatan Kualitas SDM KUMKM				
43	Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Kualitas SDM KUMKM	3.925.000.000	3.883.968.800	41.031.200	98,95
44	Kegiatan Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat dilingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau.	1.650.000.000	1.636.783.900	13.216.100	99,20
	VII Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah berbasis Sumber Daya Lokal				
45	Fasilitasi Perlindungan Produk UMKM	500.000.000	441.472.500	58.527.500	88,29
46	Penguatan ekonomi masyarakat dilingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.	6.350.000.000	5.811.470.100	638.529.900	91,52
47	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing UMKM	1.400.000.000	1.336.553.100	63.446.900	95,47
48	Pemberdayaan Koperasi Produksi dan Koperasi Konsumen	681.000.000	590.618.900	90.381.100	86,73
49	Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi Sektor Pertanian	600.000.000	567.612.300	32.387.700	94,60
	VIII Program Pengembangan Akses Permodalan dan Efektivitas Pembiayaan				
50	Fasilitasi Akses Permodalan bagi KUMKM	1.300.000.000	1.116.293.790	183.706.210	85,87
51	Pengendalian Pembiayaan KUMKM	400.000.000	350.056.800	49.943.200	87,51
	JUMLAH BELANJA (I + II)	51.523.676.000	49.472.657.036	2.051.018.964	96,02

BAB IV P E N U T U P

A. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang Koperasi dan UKM mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang koperasi dan UKM pada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas atas program/kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah. Jateng terkait pemberdayaan Koperasi dan UMKM perlu dilakukan evaluasi.

Dengan memperhatikan uraian dan paparan data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **Amat Baik**. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

- a. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai (106,71%),
- b. Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jawa Tengah menggunakan dana kurang dari dana yang dianggarkan. Hal ini berarti terjadi efisiensi sebesar Rp. 2.051.018.964,- (3,98%) dari anggaran yang disediakan

Capaian PPS yang mampu melampaui target dipengaruhi oleh banyaknya capaian indikator yang melebihi target. Salah satu indikator yang capaiannya jauh melampaui target adalah Jangkauan Pemasaran Produk KUMKM (136,84%). Hal ini disebabkan oleh kebijakan Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng yang sangat selektif untuk mengikuti pameran – pameran berskala internasional maupun regional sehingga mengakibatkan transaksi yang terjadi antara KUMKM Jawa Tengah dengan pembeli dari berbagai macam negara. Selain itu, peran aktif Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan promosi atas produk – produk unggulan daerah melalui aneka pameran dan promosi yang dibarengkan dengan agenda wisata turut mendorong perluasan jangkauan pemasaran produk KUMKM Jawa Tengah.

Apabila dilihat dari sisi pendapatan, pada tahun 2017 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah mampu memberikan kontribusi pendapatan sebesar Rp. 732.015.000,- atau lebih besar Rp. 2.015.000,- (100,28 %) dari target pendapatan sebesar Rp. 730.000.000,-. Terlampauinya target tersebut disebabkan oleh optimalisasi pemanfaatan UMKM Center di Jl. Setiabudi no 192 Semarang dan UPT Balatkop dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi bagi masyarakat.

B. PERMASALAHAN ATAU KENDALA YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN KINERJA

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program/kegiatan adalah :

1. Tingkat pemahaman masyarakat tentang peran dan manfaat koperasi relatif terbatas. Hal ini menjadikan koperasi belum menjadi pilihan utama masyarakat sebagai sarana perekonomian.
2. Lambatnya regenerasi pengurus koperasi mengakibatkan kualitas sumber daya manusia relatif terbatas dan kurang kompetitif.
3. Koperasi belum sepenuhnya menerapkan azas, nilai-nilai dan prinsip-prinsip sesuai dengan jati diri perkoperasian.
4. Tingkat produktivitas dan daya saing UMKM belum optimal akibat keterbatasan permodalan serta rendahnya penguasaan proses produksi dan teknologi.
5. Tidak seimbang antara jumlah aparatur pembina dengan jumlah koperasi dan UMKM yang ada, selain itu lemahnya dukungan sarana prasarana dan tingkat pengetahuan yang sangat heterogen mengakibatkan upaya pemberdayaan dan pembinaan KUMKM di Jawa Tengah belum optimal.

C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Strategi yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Mendorong peningkatan pengetahuan masyarakat tentang perkoperasian sehingga koperasi dapat menjadi pilihan utama masyarakat sebagai sarana perekonomian.

- a. Melakukan promosi dan kampanye Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi, serta *roadshow* edukasi kepada masyarakat melalui dialog interaktif, layanan konsultasi koperasi, serta sosialisasi lewat media cetak maupun elektronik.
 - b. Meningkatkan sosialisasi manfaat berkoperasi kepada kelompok-kelompok masyarakat ataupun kelompok usaha.
 - c. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi secara berkala.
 - d. Meningkatkan kualitas administrasi dan kelembagaan koperasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Mendorong regenerasi pengurus koperasi melalui pembinaan secara rutin. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dilaksanakan melalui :
- a. Penyelenggaraan aneka pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, manajerial, ataupun teknis bagi pengurus/pengelola koperasi.
 - b. Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi ataupun Perusahaan Besar dalam hal penyediaan instruktur maupun tenaga pengajar yang berkompeten.
 - c. Memberikan kesempatan kepada KUMKM untuk dapat melaksanakan magang maupun pelaksanaan program *on the job training* pada perusahaan besar.
3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing KUMKM melalui :
- a. Meningkatkan sosialisasi atas program-program pembiayaan, baik program pembiayaan dari Pemerintah maupun Perbankan, kepada KUMKM.
 - b. Memberikan pendampingan kepada KUMKM melalui tenaga pendamping ataupun BDS.
4. Mendorong kabupaten/kota dalam untuk menyediakan dukungan sarana prasarana serta pelatihan bagi aparatur pembina Koperasi dan UMKM di daerah.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 untuk OPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang

Semarang, Februari 2017
**KEPALA DINAS KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

Dra. EMA RACHMAWATI, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19660517 199008 2 001

Lampiran 1

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya peran Koperasi dalam perekonomian Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentase Koperasi Aktif 2. Presentase Koperasi Provinsi Berkualitas 3. Presentase Koperasi Sehat 4. Presentase omzet Koperasi terhadap PDRB Jawa Tengah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 81,90% 2. 61% 3. 18,30% 4. 6,90% 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 82,81% 2. 61,69% 3. 19,86% 4. Data belum tersedia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 101,11% 2. 101,13% 3. 108,52% 4. n/a
Bertambahnya jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jateng	Jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa Tengah	210 Produk	210 Produk	100%
Meningkatnya daya saing KUMKM di Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentase Pertumbuhan Aset Koperasi 2. Presentase Pertumbuhan Aset UMKM yang dibina 3. Presentase Pertumbuhan Omset Koperasi 4. Presentase Pertumbuhan Omset UMKM yang dibina 5. Presentase UMKM yang telah mengakses kredit 6. Jangkauan Pemasaran Produk KUMKM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 13,55% 2. 13,10% 3. 13,85% 4. 12,50% 5. 25,5% 6. 16 Prov, 3 Luar Negeri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 13,92% 2. 14,67% 3. 13,94% 4. 13,03% 5. 30,43% 6. 20 Prov, 6 Luar Negeri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 102,73% 2. 111,98% 3. 100,64% 4. 104,24% 5. 119,33% 6. 136,84%
Meningkatkan jumlah wirausaha di Jawa Tengah	Penumbuhan wirausaha baru di Jawa Tengah	325 orang	325 orang	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya penyerapan tenaga kerja oleh KUMKM	Presentase Pertumbuhan Tenaga Kerja KUMKM	12,75%	12,84%	100,71%
Meningkatnya Kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKM	Pengelola KUMKM yang kompeten	17.375 orang	17.375 orang	100%

Lampiran 2

**ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN APBD	REALISASI	SELISIH	%
1	2	3	4	5	6
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	18.393.643.000	18.140.116.997	253.526.003	98,62
II	BELANJA LANGSUNG	33.130.033.000	31.332.540.039	1.797.492.961	94,57
	I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Dinas	12.000.000	10.481.730	1.518.270	87,35
2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balatkop	7.000.000	6.999.060	940	99,99
3	Penyediaan Jasa komunikasi, SDA dan Listrik Sekretariat Dinas	620.000.000	607.390.393	12.609.607	97,97
4	Penyediaan Jasa komunikasi, SDA dan Listrik Balatkop	330.000.000	293.874.977	36.125.023	89,05
5	Jaminan Barang Milik Daerah	70.000.000	69.678.131	321.869	99,54
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Sekretariat Dinas	510.000.000	504.150.820	5.849.180	98,85
7	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balatkop	250.000.000	248.981.800	1.018.200	99,59
8	Penyediaan alat tulis kantor Sekretariat	200.000.000	167.838.000	32.162.000	83,92
9	Penyediaan alat tulis kantor Balatkop	50.000.000	49.479.250	520.750	98,96
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	75.000.000	71.799.925	3.200.075	95,73
11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan Sekretariat	50.000.000	49.940.000	60.000	99,88
12	Penyediaan barang cetak dan penggandaan Balatkop	25.000.000	25.000.000	0	100
13	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Sekretariat	50.000.000	41.006.000	8.994.000	82,01

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN APBD	REALISASI	SELISIH	%
1	2	3	4	5	6
14	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Balatkop	50.000.000	49.651.000	349.000	99,30
15	Penyediaan peralatan rumah tangga Sekretariat	20.000.000	19.626.000	374.000	98,13
16	Penyediaan peralatan rumah tangga Balatkop	10.000.000	10.000.000	0	100
17	Penyediaan bahan bacaan, peraturan perundang – undangan Sekretariat	24.000.000	23.925.000	75.000	99,69
18	Penyediaan bahan bacaan, peraturan perundang – undangan Balatkop	10.000.000	9.970.000	30.000	99,70
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah Sekretariat	1.135.000.000	1.117.995.593	17.004.407	98,50
20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah Balatkop	75.000.000	71.799.925	3.200.075	95,73
21	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Sekretariat Dinas	765.000.000	755.311.843	9.688.157	98,73
22	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Balatkop	113.000.000	112.572.000	428.000	99,62
23	Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi	600.000.000	592.012.000	7.988.000	98,67
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
24	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Sekretariat Dinas	450.000.000	445.204.706	4.795.292	98,93
25	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Balatkop	48.000.000	47.999.970	30	99,99
26	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	350.000.000	348.950.329	1.049.671	99,70
27	Pemeliharaan rutin/ berkala meubelair Sekretariat	20.000.000	20.000.000	0	100
28	Pemeliharaan rutin/ berkala meubelair Balatkop	20.000.000	20.000.000	0	100
29	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan Rumah tangga Sekretariat	250.000.000	248.185.700	1.814.300	99,27
30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan Rumah tangga Balatkop	50.000.000	49.950.000	50.000	99,90

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN APBD	REALISASI	SELISIH	%
1	2	3	4	5	6
31	Peningkatan sarana dan prasarana kantor Sekretariat	380.000.000	369.949.000	10.051.000	97,36
32	Peningkatan sarana dan prasarana kantor Balatkop	66.000.000	65.261.000	739.000	98,88
	III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.				
33	Pendidikan dan Pelatihan Formal.	50.000.000	44.652.000	5.348.000	89,30
	IV Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM.				
34	Peningkatan Pemasarakatan dan Kelembagaan Koperasi	812.500.000	759.578.200	52.921.800	93,49
35	Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	1.812.500.000	1.763.776.300	48.723.700	97,31
36	Pemeringkatan Koperasi dan Penilaian Kesehatan KSP	1.512.500.000	1.479.638.450	32.861.550	97,83
37	Pengembangan Manajemen dan Usaha KSP	1.512.500.000	1.446.519.800	65.980.200	95,64
38	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemberdayaan KUMKM	914.033.000	846.712.900	67.320.100	92,63
	V Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha				
39	Peningkatan Jaringan Produk KUKM bagi Anggota Mitra Praja Utama (MPU)	300.000.000	244.765.614	55.234.386	81,59
40	Fasilitasi Akses Pemasaran bagi Produk KUMKM	2.396.650.000	2.161.374.956	235.275.044	90,18
41	Pengembangan Layanan Usaha bagi KUMKM	325.000.000	319.230.400	5.762.600	98,22
42	Komite Pemasaran Produk Unggulan Produk KUMKM	3.350.000	3.350.000	0	100
	VI Program Peningkatan Kualitas SDM KUMKM				
43	Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Kualitas SDM KUMKM	3.925.000.000	3.883.968.800	41.031.200	98,95
44	Kegiatan Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat dilingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau.	1.650.000.000	1.636.783.900	13.216.100	99,20

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN APBD	REALISASI	SELISIH	%
1	2	3	4	5	6
	VII Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah berbasis Sumber Daya Lokal				
45	Fasilitasi Perlindungan Produk UMKM	500.000.000	441.472.500	58.527.500	88,29
46	Penguatan ekonomi masyarakat dilingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.	6.350.000.000	5.811.470.100	638.529.900	91,52
47	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing UMKM	1.400.000.000	1.336.553.100	63.446.900	95,47
48	Pemberdayaan Koperasi Produksi dan Koperasi Konsumen	681.000.000	590.618.900	90.381.100	86,73
49	Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi Sektor Pertanian	600.000.000	567.612.300	32.387.700	94,60
	VIII Program Pengembangan Akses Permodalan dan Efektivitas Pembiayaan				
50	Fasilitasi Akses Permodalan bagi KUMKM	1.300.000.000	1.116.293.790	183.706.210	85,87
51	Pengendalian Pembiayaan KUMKM	400.000.000	350.056.800	49.943.200	87,51
	JUMLAH BELANJA (I + II)	51.523.676.000	49.472.657.036	2.051.018.964	96,02